

PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021-2023

Orin Aririn Nur Chosidah¹, Ahmad Zakie Mubarak²

^{1,2}Universitas Padjajaran

Email: orin21001@mail.unpad.ac.id¹, ahmad.zakie@unpad.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Populasi terdiri dari 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan sampel akhir sebanyak 30 daerah yang memenuhi kriteria kelengkapan data selama tiga tahun penelitian, sehingga total observasi adalah 90 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah; (2) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah; dan (3) secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya temuan audit dan tingginya efektivitas tindak lanjut merupakan kombinasi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan yang efektif sebagai strategi untuk mendorong kinerja pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kinerja Pemerintah Daerah, EPPD, Regresi Data Panel.

Abstract

This study aims to examine the impact of Audit Findings and Follow-Up of Audit Results on the Performance of District/City Governments in East Java Province in 2021–2023. This research employs a quantitative method with a panel data regression approach. The population consists of 38 district/city governments in East Java, with a final sample of 30 regions that met the data completeness criteria for the three-year study period, resulting in a total of 90 observations. The results show that: (1) Audit Findings have a negative and significant effect on local government performance; (2) Follow-Up of Audit Results has a positive and significant effect on local government performance; and (3) simultaneously, both variables have a significant effect on performance. These findings indicate that low audit findings and high follow-up effectiveness are an important combination in improving local government performance. This research emphasizes the importance of strengthening internal control systems, compliance with regulations, and effective follow-up mechanisms for audit results as strategies to promote more transparent, accountable, and service-oriented local government performance.

Keywords: *Audit Findings, Follow-Up of Audit Results, Local Government Performance, EPPD, Panel Data Regression.*

A. PENDAHULUAN

Isu penting pasca reformasi adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki kriteria, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kriteria tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP serta regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil LHP tersebut, BPK mencatat sebanyak 15.869 temuan yang mencakup kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan yang berdampak pada kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta pelanggaran prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E). Total nilai temuan tersebut mencapai Rp18,19 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas terkait telah menindaklanjuti sebagian temuan dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset senilai Rp852,82 miliar.

Pada Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2022 mengungkapkan sebanyak 9.158 temuan yang mencakup 15.674 permasalahan dengan total nilai mencapai Rp18.37 triliun. Dari jumlah tersebut, 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI). Selain itu, terdapat 8.116 permasalahan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai sebesar Rp17,33 triliun. Sementara itu, 538 permasalahan lainnya terkait dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan, dengan total nilai sebesar Rp1,04 triliun.

Pada LHP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengalami fluktuasi opini. Berdasarkan laporan BPK RI, pengelolaan keuangan Kabupaten Jember tahun 2019 mendapat opini disclaimer. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi belanja di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai temuan mencapai lebih dari Rp70 miliar. Temuan ini dinilai tidak tepat serta melanggar aturan yang berlaku.

Selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Kota Pasuruan hanya mampu meraih opini WDP. BPK menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta

ketidapatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini membuat penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya wajar. Beberapa masalah utama yang ditemukan meliputi ketidaktertiban dalam pengelolaan aset tetap, pencatatan KDP yang tidak sesuai ketentuan, serta penyajian saldo Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang belum mengikuti standar akuntansi.

Di Jawa Timur, sebagian besar pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, sekaligus menggambarkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tidak semua daerah mampu meraih hasil yang sama. Masih ada pemerintah daerah yang hanya mendapatkan opini WDP atau bahkan Tidak Wajar.

Dari uraian di atas mengenai temuan audit serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, hal ini memiliki keterkaitan erat dengan kinerja pemerintahan. Langkah-langkah perbaikan yang diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari TLHP berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas Pemerintah Daerah Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah serta sering menjadi sasaran pemeriksaan oleh BPK. Dengan wilayah yang luas mencakup 38 kabupaten/kota, Jawa Timur menunjukkan perbedaan dalam kualitas tata kelola keuangan serta implementasi rekomendasi hasil audit. Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan total populasi yang melebihi 41 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini menjadi tantangan tersendiri dalam aspek tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik.

Penelitian ini akan lebih mendalam dengan fokus khusus pada Jawa Timur. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik terkait dinamika pengelolaan keuangan dan implementasi rekomendasi audit di lingkungan pemerintahan yang kompleks. Selain itu, penelitian ini akan memperbarui literatur dengan mengkaji data terbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor unik yang mempengaruhi kinerja pemerintahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur pasca temuan audit dan tindak lanjutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur dan menjadi referensi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, (1976). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu principal (masyarakat) dan agen (pemerintah). Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik; dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dan memberikan laporan kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan laporan akuntabilitas yang jelas dan akurat kepada masyarakat dalam konteks ini untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Teori Institusional

Teori Institusional (Institutional Theory) menyatakan bahwa organisasi terbentuk sebagai respons terhadap tekanan dari lingkungan institusional, yang pada akhirnya memicu proses institusionalisasi. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa agar dapat terus eksis, organisasi harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa keberadaannya sah atau legitimate. Menurut teori ini, organisasi yang menempatkan legitimasi sebagai hal utama cenderung akan menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial dan lingkungan eksternal tempat mereka beroperasi (Prasad et al., 2024). Tindak lanjut hasil audit sering dilakukan untuk menciptakan kesan kepatuhan, sekalipun tidak selalu berdampak langsung pada efisiensi. Dalam kerangka teori institusional, peningkatan kinerja merupakan bentuk legitimasi institusional yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap audit dan aturan tata kelola.

Akuntabilitas Publik

Menurut Bovens, (2007), konsep penting dalam pemerintahan adalah akuntabilitas publik, yang menekankan bahwa pemerintah harus transparan, bertanggung jawab, dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Konsep ini menjadi dasar dari pemerintahan yang baik dan demokratis. Transparansi dan pertanggungjawaban adalah dua komponen utama akuntabilitas publik.

Audit

Audit didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Agoes & Ardana, (2017), audit adalah “pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan dan bukti pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

1. Temuan Audit

Dalam penelitian ini, variabel Temuan Audit dapat diukur dengan beberapa pendekatan kuantitatif untuk mencerminkan tingkat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan proses penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah ini diambil oleh entitas yang diaudit untuk menindaklanjuti rekomendasi auditor dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Proses ini mencakup implementasi rekomendasi, pemantauan kemajuan dan evaluasi efektivitas tindak lanjut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mewajibkan pemerintah di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan.

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun, (2006), Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, yang tercakup dalam perencanaan strategis organisasi. Dengan demikian, kinerja mencerminkan sejauh mana individu, unit kerja, atau organisasi

mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan secara sah, etis, dan sesuai norma.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan adanya penyimpangan, ketidakpatuhan, atau kelemahan SPI pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut teori keagenan, pemerintah daerah (agen) memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (principal). Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi asimetri informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan agen tidak sepenuhnya transparan atau akuntabel.

H1: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

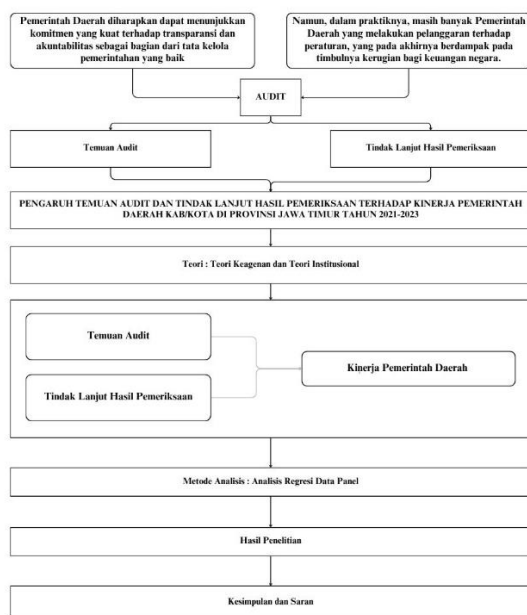
- b. TLHP merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan teori institusional, organisasi publik seperti pemerintah daerah cenderung menyesuaikan diri terhadap tekanan normatif dan regulatif dari lingkungan eksternal, seperti lembaga audit negara, untuk mempertahankan legitimasi dan kelangsungan eksistensinya. Hal ini meningkatkan transparansi, integritas birokrasi, dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

H2: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

- c. Temuan audit yang tinggi mengindikasikan kelemahan tata kelola, namun jika diikuti dengan tindak lanjut yang tepat, dampaknya terhadap kinerja dapat ditekan. Oleh karena itu, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara simultan diperkirakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki kebaruan karena belum banyak yang menguji pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersamaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

H3: Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

Model Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Menurut Sugiyono, (2013) menyatakan bahwa metode ini efektif jika peneliti ingin memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki atribut yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini melibatkan seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi ini dipilih karena mencakup bidang yang relevan dengan tata kelola keuangan dan audit. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) selama tiga tahun, yaitu 2021 hingga 2023.

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel

Kriteria	Total
LK Kab/Kota Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK	38
Kab/Kota yang tidak memiliki data temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	(8)
Kab/Kota Pemerintah Daerah yang dijadikan sampel penelitian	30
Total Sampel Penelitian (2021-2023)	90

Sumber : Data Olah (2025)

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2013), pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) yang diambil melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Operasionalisasi Variabel

Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian berikut ini:

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Temuan Audit (X1)	Temuan audit adalah hasil dari pelanggaran peraturan pengendalian internal dan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah tidak mematuhi perundang-undangan, bahkan negara dapat mengalami kerugian, menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggaran pemerintah akan mengakibatkan kinerja keuangan daerah semakin buruk Sesotyaningtyas, (2012).	$\frac{\text{Temuan Audit}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$ = <i>Temuan Audit (dalam rupiah)</i> (Rasyid et al., 2022)	Rasio
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X2)	Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh auditor kepada entitas yang diperiksa untuk memperbaiki kelemahan, kekurangan, atau pelanggaran yang ditemukan	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}}$ = <i>Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti (sesuai dengan rekomendasi)</i>	Nominal

	dalam pemeriksaan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan serta tata kelola entitas BPK RI, (2021)	<i>Total Jumlah Temuan</i> (Indriani et al., 2024) dan (Furqan et al., 2020)	
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Gambaran bagaimana suatu kegiatan, program, atau kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Noviyanti & Kiswanto, (2016)	Skor EPPD (Ditasari & Sudrajat, 2020)	Nominal

Sumber : Olah Data (2025)

Metode Analisis Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews.

Model regresi data panel secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel dependen (kinerja pemerintah daerah) pada kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t
- X_{1it} : Temuan audit pada kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t
- X_{2it} : Tindak lanjut hasil pemeriksaan pada kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t
- α : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- ε_{it} : Error term.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data variabel penelitian, yaitu Temuan Audit (X1), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X2), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	TEMUAN AUDIT	TINDAK LANJUT	KINERJA PEMDA
Mean	0.005222	2.084222	2.995222
Median	0.000000	1.910000	3.130000
Maximum	0.090000	10.33000	3.780000
Minimum	0.000000	0.090000	0.000000
Std. Dev.	0.014552	1.297848	0.621409
Observations	90	90	90

Sumber : Olah Data Eviews

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap variabel lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, yang menunjukkan data baik.

Uji Model

1. Uji Chow

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah efek tetap (fixed effect) signifikan dalam model atau tidak.

Tabel 4 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.917630	(29,58)	0.5904
Cross-section Chi-square	33.986207	29	0.2398

Sumber : Olah Data Eviews

Dari table uji chow diatas Nilai Prob 0.2398 > 0.05, maka yang terpilih **CEM** sesuai dengan ketentuan.

2. Uji Hausman

Uji ini penting untuk melihat apakah efek individual dalam data berkorelasi dengan variabel independen.

Tabel 5 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.349243	2	0.0418

Sumber : Olah Data Eviews

Dari table uji hausman diatas Nilai Prob $0.0418 < 0.05$, maka yang terpilih **FEM** sesuai dengan ketentuan.

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji ini penting untuk menguji apakah terdapat efek random dalam model atau cukup dengan pooled OLS (CEM).

Tabel 6 Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.316758 (0.5736)	1.929564 (0.1648)	2.246322 (0.1339)
Honda	-0.562813 (0.7132)	1.389088 (0.0824)	0.584265 (0.2795)
King-Wu	-0.562813 (0.7132)	1.389088 (0.0824)	1.200577 (0.1150)
Standardized Honda	-0.468296 (0.6802)	2.308736 (0.0105)	-3.846595 (0.9999)
Standardized King-Wu	-0.468296 (0.6802)	2.308736 (0.0105)	-0.974068 (0.8350)
Gourieroux, et al.	--	--	1.929564 (0.1777)

Sumber : Olah Data Eviews

Dari table uji LM diatas Nilai Prob $0.5736 > 0.05$, maka yang terpilih **CEM** sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah **CEM**.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 7 Uji Multikolonieritas (1)

	TEMUAN AUDIT	TINDAK LANJUT
TEMUAN AUDIT	1.000000	0.183074
TINDAK LANJUT	0.183074	1.000000

Sumber : Olah Data Eviews

Dari data diatas koefisien korelasi Temuan Audit dan Tindak Lanjut sebesar 0.180374 < 0.80. Maka dapat disimpulkan bahwa **terbebas multikolinearitas** atau lolos uji multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021).

Tabel 8 Uji Multikolonieritas (2)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005047	5.084347	NA
TA	7.497343	1.263834	1.133480
TLHP	0.001070	5.611862	1.133480

Sumber : Olah Data Eviews

Dari data diatas nilai VIF Temuan Audit sebesar 1.263834 < 10 dan Tindak Lanjut sebesar 5.611862 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa **terbebas multikolinearitas** atau lolos uji multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat varians residual yang tidak sama pada setiap pengamatan dalam model regresi dengan menggunakan uji white.

Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.495806	Prob. F(5,84)	0.7785
Obs*R-squared	2.579961	Prob. Chi-Square(5)	0.7644
Scaled explained SS	16.54866	Prob. Chi-Square(5)	0.0054

Sumber : Olah Data Eviews

Dari data diatas nilai p-value Obs*R-square $0.7644 > 0.05$, maka **tidak ada heteroskedastisitas pada** model tersebut. (Novita Sari Naibaho & Kurnia Shanti, 2022).

Uji Regresi Data Panel

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 0.145290 - 2.322066*TA + 0.022130*TLHP$$

Pembulatan

$$Y = 0.15 - 2.32*X1 + 0.02*X2$$

Adapun penjelasnya adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0.15 artinya tanpa adanya variable TA (X1) dan TLHP (X2) maka variable KP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 15%
2. Nilai koefisien beta variable TA (X1) sebesar -2.32, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 15%, maka variabel KP (Y) akan mengalami penurunan sebesar 232%. Begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien beta variable TLHP (X2) sebesar 0.02, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 15%, maka variabel KP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2%. Begitu pula sebaliknya.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Uji statistik t digunakan untuk menganalisis pengaruh signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 10 Uji Parsial

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	0.145290	0.022329	6.506730	0.0000
TA	-2.322066	1.101178	-2.108711	0.0378
TLHP	0.022130	0.009777	2.263529	0.0261

Sumber : Olah Data Eviews

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- Hasil uji t pada variabel TA (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.108711 > t table 1.987289 dan nilai sig. 0.0378 < 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya variabel TA berpengaruh terhadap KP.
- Hasil uji t pada variabel TLHP (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.2633529 > t table 1.987289 dan nilai sig. 0.0261 < 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya variabel TLHP berpengaruh terhadap KP.

Uji Simultan (f)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 11 Uji Simultan

R-squared	0.088590	Mean dependent var	0.580186
Adjusted R-squared	0.067638	S.D. dependent var	0.522272
S.E. of regression	0.381786	Sum squared resid	12.68119
F-statistic	4.228254	Durbin-Watson stat	1.621630
Prob(F-statistic)	0.017683		

Sumber : Olah Data Eviews

Dari data table diatas Nilai F hitung sebesar 4.228254 > F table yaitu 3.101296 dan nilai sig. 0.017683 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel TA dan TLHP berpengaruh terhadap KP.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 12 Uji Koef. Determinasi

R-squared	0.088590	Mean dependent var	0.580186
Adjusted R-squared	0.067638	S.D. dependent var	0.522272
S.E. of regression	0.381786	Sum squared resid	12.68119
F-statistic	4.228254	Durbin-Watson stat	1.621630
Prob(F-statistic)	0.017683		

Sumber : Olah Data Eviews

Dari data diatas Nilai adjusted R Square sebesar 0.067638 atau 6.76%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari TA dan TLHP **mempu menjelaskan** variabel KP sebesar 6.76%, sedangkan sisanya 93.24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Artinya, semakin banyak atau semakin besar nilai temuan audit baik terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun ketidakpatuhan pada peraturan, maka skor kinerja daerah cenderung menurun. Temuan audit yang tinggi menjadi sinyal adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga berimbas pada pencapaian target. Hal ini selaras dengan Teori Keagenan, di mana pemerintah daerah (agen) gagal memenuhi ekspektasi dan akuntabilitas kepada masyarakat (principal) ketika temuan audit meningkat.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai arahan, semakin baik pula kinerja daerah tersebut. Tindak lanjut yang efektif mampu menutup kelemahan sistem, memperbaiki pelanggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik. Temuan ini sejalan dengan Teori Institusional, yang

menegaskan bahwa respons positif terhadap tekanan dan tuntutan eksternal dalam hal ini dari BPK dapat memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan mendorong peningkatan kinerja.

3. Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kombinasi temuan audit yang rendah dan tindak lanjut yang tinggi adalah formula yang paling efektif untuk mencapai kinerja optimal. Bahkan, jika temuan audit terlanjur tinggi, dampak buruknya masih bisa ditekan apabila tindak lanjut dilakukan dengan cepat, tepat, dan menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan kepada Peneliti Selanjutnya, antara lain:

- a. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah (Jawa Timur) dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk:
- b. Menambahkan variabel lain seperti belanja modal, opini audit, kualitas SDM, ukuran pemerintah daerah, kapasitas fiskal daerah atau efektivitas perencanaan program.
- c. Memperluas ruang lingkup ke provinsi lain atau membandingkan antar wilayah.
- d. Menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed method untuk menggali lebih dalam penyebab rendahnya tindak lanjut atau tingginya temuan audit

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2017). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020*. Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104–117.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service

- quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Indriani, D., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region). *The Contrarian : Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.58784/cfabr.159>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Mahsun. (2006). Dalam Auditya, Lucy dkk. 2013. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Madenatera.
- Novita Sari Naibaho, E., & Kurnia Shanti, Y. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI, TINDAKLANJUTI HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Prasad, V. H., Sharma, N. L., & Prakash, S. (2024). Development of internal auditing in Fiji: An institutional theory approach. *Corporate Ownership and Control*, 21(3), 138–149. <https://doi.org/10.22495/cocv21i3art12>
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (e-Journal)*, 10(2).
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Sugiyono (ed.)).
ALFABETA, CV.